

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN

Dede Sunaryat
Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur.
Email: sunaryatdede@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh implementasi kebijakan pengembangan SMK yang telah menyebabkan berkembang pesatnya jumlah SMK di Kabupaten Cianjur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memotret dan menganalisis tentang bagaimana kebijakan tersebut difahami, diimplementasikan dan dikendalikan, baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat sekolah, program spesifik seperti apa yang dipilih, nilai tambah apa yang diperoleh, peran serta masyarakat seperti apa yang menjadi pendukung, serta model pengembangan seperti apa yang diharapkan di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Melalui penelitian tersebut telah ditemukan bahwa pada dasarnya para pelaksana kebijakan telah memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan; kebijakan telah diimplementasikan dengan memberdayakan berbagai unsur kekuatan; SMK Kecil terpisah dari SMP dan USB SMK serta SMK sebagai rintisan wajar 12 tahun merupakan program spesifik yang dipilih; implementasi kebijakan telah mampu meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah; masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan; dan kedepan diharapkan agar kebijakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan visi, misi serta tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dinilai belum maksimal, karena belum mampu menyerap seluruh lulusan SLTP. Untuk itu, perlu ada upaya penyempurnaan terhadap implementasi kebijakan ke depan, diantaranya dengan menerapkan model SMK berbasis ekonomi masyarakat pedesaan.

Kata kunci: Implementasi, sekolah menengah kejuruan, aksesibilitas.

ABSTRACT

The back ground of this study was the implementation of vocational school development policy which has improved the number of vocational school in Cianjur. The aim of the study is to portray and to analyse about how the policy was understood, implemented and controlled, what specific program was elected, what were the outcomes, how the community supported the policy, and what kind of implementation which is desired in the future. The study approach was qualitative based on case study. The study has found that basically the implementators of the policy having good understanding toward the policy; the policy has been implemented by empowering many resources; the specific program were small vocational school separated from secondary school, new school unit of vocational school and vocational school as a pioneer of 12 years compulsory education; the policy has improved the accesibility of high school education; the community having significant role; and the stake holders hoping that in the future the policy will be implemented based on area needs and in accordance with county vision, missions and goals. Because there are still many secondary schools graduations can not continue their study, the policy implemetation must be improved. One among the kinds of improvement proposed is implementing the model of "rural society economy based vocational high school".

Key words: Implementation, vocational high school, accesibility.

PENDAHULUAN

Kabupaten Cianjur, dilihat dari sisi pemerataan pendidikan - khususnya ketersediaan pendidikan menengah – sampai dengan tahun 2002 masih memiliki kendala yang sangat serius, sebagai akibat dari adanya kendala geografis dan ekonomi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional secara eksplisit mencantumkan salah satu sasaran dalam mencapai rencana strategisnya tahun 2010-2014 berupa peningkatan ratio SMK:SMA 67:33. Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, yaitu pengembangan pendidikan kejuruan, bagi Kabupaten Cianjur dianggap langkah strategis. Berdasarkan alasan tersebut, sejak tahun 2003 Kabupaten Cianjur mulai

mengembangkan jumlah SMK. Hasilnya adalah, dari tahun ke tahun jumlah SMK Negeri dan swasta terus bertambah. Selain itu, pesatnya perkembangan SMK juga telah mampu meningkatkan jumlah siswa SLTA dan mengubah porsi jumlah siswa SMK dibandingkan dengan jumlah siswa SMA.

Fenomena tersebut tentu saja sangat menggembirakan, namun sekaligus memiliki sisi yang mengkhawatirkan, karena, sebagaimana diketahui, penyelenggaraan SMK membutuhkan tenaga dan infra struktur yang berbeda dengan SMA. Sisi yang mengkhawatirkan dari fenomena tersebut adalah banyaknya SMK baru yang

didirikan dan tidak disertai dengan dukungan ketersediaan infra struktur dan tenaga yang memadai, yang dapat menyebabkan rendahnya mutu pembelajaran serta rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan.

Menurut analisis penulis, pada dasarnya permasalahan implemementasi kebijakan tersebut dapat terletak pada tiga level, yaitu pada level pemerintah pusat, pada level pemerintah daerah dan pada level sekolah. Pada level pemerintah pusat masalah yang terjadi adalah bahwa program bantuan yang diberikan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut belum dibuat secara berkeadilan, karena dana bantuan diberikan kepada setiap daerah dengan jumlah yang disama-ratakan untuk setiap sekolah, tanpa memperhatikan faktor kemahalan pada setiap daerah. Pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, permasalahan yang penulis temukan sementara diantaranya terkait dengan: (1) keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber daya dan sumber dana, (2) pemahaman para pejabat; (3) perencanaan (4) sering berganti-gantinya pejabat di daerah (5) masuknya kepentingan politik ke dalam dunia pendidikan; dan (6) lemahnya sistem data yang ada di Kantor Dinas Pendidikan. Sedangkan pada level sekolah, permasalahan yang sementara ini penulis temukan adalah bahwa belum semua SMK yang saat ini ada memiliki sarana, dana dan sumber daya manusia yang memadai sebagaimana dipersyaratkan SNP.

Penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan-permasalahan implementasi kebijakan pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan pada level sekolah. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi informasi pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pemahaman para pelaksana kebijakan di Kabupaten Cianjur terhadap pengembangan pendidikan menengah kejuruan?
2. Bagaimana gambaran implementasi kebijakan pengembangan SMK di Kabupaten Cianjur, yang meliputi:
 - a. Strategi apa saja yang digunakan?
 - b. Program-program spesifik apa yang dipilih?
 - c. Nilai tambah seperti apa yang diperoleh?
3. Bagaimana kebijakan tersebut dikendalikan dan dievaluasi?
4. Bagaimana kebijakan pengembangan SMK tersebut dilaksanakan pada tingkat sekolah?
5. Partisipasi masyarakat seperti apa yang mampu mendukung sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu?

6. Pengembangan SMK seperti apa yang diharapkan pada masa yang akan datang?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai hal sebagaimana disebutkan, sehingga akan diperoleh data yang obyektif dan valid menyangkut kesenjangan antara harapan yang diinginkan terhadap implementasi kebijakan dengan hasil sesungguhnya yang telah dicapai, dengan demikian akan ditemukan model pengembangan yang akan diusulkan.

Dilihat dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada para pengambil kebijakan. Sedangkan dari sisi keilmuan, penelitian ini akan sangat bermanfaat, khususnya bagi penulis, dalam kepentingannya untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan serta wawasan mengenai ilmu administrasi pendidikan dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan.

Fowler (2009:13), mengatakan: *“The policy is the sequence of event that occurs when a political system considers different approaches to public problems, adopts one of them, tries it out, and evaluate it”*. Menurut Engkoswara dan Komariah (2010:107) pengambilan keputusan penting sebagai jalan memecahkan masalah dan sebagai upaya mempertahankan organisasi. Sedangkan Patton dan Sawicki (Tilaar dan Nugroho, 2008:188) menggambarkan sebuah proses kebijakan sebagai suatu siklus yang terdiri atas kegiatan: (1) Mendefinisikan permasalahan; (2) menentukan kriteria evaluasi, (3) mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif, (4) mengevaluasi kebijakan- kebijakan alternatif, (5) memilih kebijakan yang dikehendaki, dan (6) mengimplementasikan kebijakan yang dikehendaki. Selanjutnya Dunn (2003) dan Goodman (2012) menyatakan bahwa kebijakan merupakan ilmu tentang pemecahan masalah yang menggambarkan teori-teori, metode-metode dan pencarian substantif terhadap ilmu-ilmu tentang perilaku dan sosial, profesi-profesi serta falsafah-falsafah sosial dan politik. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan pentingnya kebijakan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan publik.

Fattah (2009:5) menyatakan bahwa nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*labor intensif*), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*brain intensif*). Pendapat ini mengindikasikan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Becker (1993:17) menyatakan: *“Education and training are the most important investment in human capital”*. Sedangkan Supriadi (2002:83) mengemukakan: *“Teori-teori*

ekonomi menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara pendidikan dengan pertumbuhan". Dengan kata lain, secara ekonomi pendidikan memiliki arti strategis bagi peningkatan kualitas atau martabat hidup manusia dan martabat sebuah bangsa.

The Right to Education Project, mendefinisikan aksesibilitas pendidikan sebagai: "...that the system is non-discriminatory and accessible to all, and that positive steps are taken to include the most marginalised" (*The Right to Education Project*, diunduh 14 Februari 2013); Komitmen Dakar pada tahun 2000 tentang *Education For All (EFA)* mengindikasikan bahwa pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, gender, agama, kondisi sosial ekonomi, budaya, lokasi tempat tinggal dan lain lain. Artinya bahwa layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan, ras, agama, jenis kelamin, taraf ekonomi serta lokasi tempat tinggal.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan menurut Nath dan Balan (2010:2) bahwa mutu pendidikan terdiri atas dua dimensi, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi bangunan dan fasilitas infrastruktur lainnya, sedangkan perangkat lunak meliputi, guru, siswa dan staf administrasi. Hal serupa dikemukakan oleh Sallis (2002) yang menyatakan bahwa banyak hal yang menjadi penentu mutu pendidikan, termasuk didalamnya adalah ketersediaan infra struktur, tenaga pendidik, dan kurikulum.

Hoy dan Miskel (2008:23-25) menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan sistem sosial yang terbuka. Pendidikan disebut sebagai sistem sosial yang terbuka karena ia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya serta mempengaruhi lingkungan tempat sekolah

tersebut berada. Dalam buku panduan dewan pendidikan halaman 2 disebutkan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan fihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau *stake holder* pendidikan. Sementara itu Suyono (2002:2) mengatakan bahwa dalam gerakan masyarakat yang gegap gempita, lingkungan masyarakat dan budaya pendukung harus mendapat pemberdayaan yang matang.

Wirida menemukan bahwa kinerja pendidikan dalam bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan belum menunjukkan hasil yang optimal. (*Sistem Informasi Penelitian Pendidikan - Puslitjak Balitbang Kemdikbud. Diunduh: 11-01-2013*). Sementara itu Mahdiansyah menemukan bahwa belum terdapat keselarasan antara mutu lulusan yang dihasilkan oleh SMK dengan yang dibutuhkan oleh industri (*Sistem Informasi Penelitian Pendidikan - Puslitjak Balitbang Kemdikbud. Diunduh: 11-01-2013*). Kedua pendapat tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan ketersediaan layanan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Sesuai dengan teori-teori, pendapat dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan dibuat dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Kebijakan harus dibuat dan dilaksanakan dengan langkah yang benar mulai dari tahap formulasi, implementasi dan evaluasi.
2. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu sarana investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang strategis, khususnya bila dihubungkan dengan kebijakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.
3. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip kebermutuan, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangatlah penting.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Ruang lingkup penelitian meliputi pejabat dinas terkait, kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, tokoh masyarakat, SMK SMK baru dan lain-lain. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri dibantu dengan kelengkapan lain seperti kisi-kisi penelitian, pedoman wawancara,

pedoman observasi, recorder, kamera, buku catatan komputer dan lain-lain. Selanjutnya, data dikoleksi melalui wawancara, observasi dan studi dokumen bersumber dari berbagai sumber yang telah dipilih melalui teknik *snowball sampling*. Data yang diperoleh dari hasil koleksi kemudian dicatat dalam catatan lapangan dan dianalisis. Sementara itu, untuk menjamin validitas dan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat pemahaman yang memadai dari para pejabat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan SMK di Kabupaten Cianjur terhadap hakikat pendidikan kejuruan, fungsi strategis pendidikan kejuruan, perbedaan pendidikan kejuruan dengan pendidikan umum serta bagaimana seharusnya pendidikan kejuruan tersebut diselenggarakan dan didanai. Pemahaman tersebut telah menjadi modal yang baik bagi terimplementasikannya kebijakan tersebut hingga dapat menghasilkan peningkatan APK SLTA yang cukup signifikan, karena melalui pemahaman yang dimilikinya, mereka telah mendukung terimplementasikannya kebijakan pengembangan SMK sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang mereka miliki.

Hahn (2012) mengatakan bahwa langkah pertama dari sebuah kebijakan adalah adanya *concern* atau perhatian, yang didalamnya terdapat langkah yang menyatakan perlunya memperhatikan gejala yang terjadi di masyarakat terkait dengan kebijakan yang akan dibuat. Sementara itu Dunn (2003) dan Patton dan Sawicki (Tilaar dan Nugroho, 2008) serta Banghat dan Trull (1997) mengatakan bahwa langkah pertama dari sebuah kebijakan adalah identifikasi terhadap permasalahan. Dalam kasus penelitian ini, para pelaksana kebijakan telah memahami betul adanya permasalahan berupa masih belum tersedianya layanan pendidikan menengah secara merata. Dilihat dari perannya dalam mendukung terlaksananya kebijakan, pada dasarnya merekapun telah berupaya untuk memerankan dirinya sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, seharusnya implementasi kebijakan pengembangan SMK yang dilakukan di Kabupaten Cianjur dapat menghasilkan hasil kebijakan yang maksimal, dalam arti dapat meningkatkan jumlah SMK yang mampu menyerap lulusan SLTP dalam jumlah yang sangat banyak dan dapat menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, yaitu yang sangat siap untuk bekerja, sangat siap untuk melakukan kegiatan usaha mandiri, serta sangat siap untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi.

Namun demikian faktanya dampak dari kebijakan tersebut masih belum maksimal. Fakta tersebut seakan menguatkan temuan Wirda dalam hasil penelitiannya yang berjudul: “**Analisis kebijakan pendidikan: Pemerataan dan perluasan akses pendidikan**”, yang menyatakan

bahwa kinerja pendidikan dalam bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Juga temuan Mahdiansyah dalam penelitiannya yang berjudul “**Kajian Hubungan Dunia Pendidikan dengan Dunia Kerja**”, yang menemukan bahwa lulusan sekolah pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) masih belum dapat memenuhi harapan dunia kerja. (Sumber: *Sistem Informasi Penelitian Pendidikan - Puslitjak Balitbang Kemdikbud*. Diunduh: 11-01-2013).

Atas dasar fakta sebagaimana disebutkan, penulis mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai *perencana level taktis*, yang membuat perencanaan lima tahunan (Cerullo dalam Salusu, 2008), sudah selayaknya Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat perencanaan peningkatan akses SMK dengan lebih matang, komprehensif dan terintegrasi, yang dilandaskan atas permasalahan atau *policy problem* (Dunn, 2003).
2. Dinas Pendidikan perlu lebih intens dalam melakukan pendekatan kepada fihak DPRD dan BAPPEDA serta dinas/instansi terkait lainnya agar sinergitas program antar lembaga dapat terjalin lebih baik sehingga program yang dibuat dapat dijalankan bersama serta memperoleh dukungan yang penuh dari unsur-unsur terkait.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens, baik secara horizontal maupun secara vertikal tentang program atau kebijakan yang akan atau sedang dilaksanakan, sehingga terbangun pemahaman yang seragam, baik antara pejabat terkait yang ada di lingkungan internal Dinas Pendidikan sendiri, maupun diantara para pejabat terkait di luar Dinas Pendidikan.

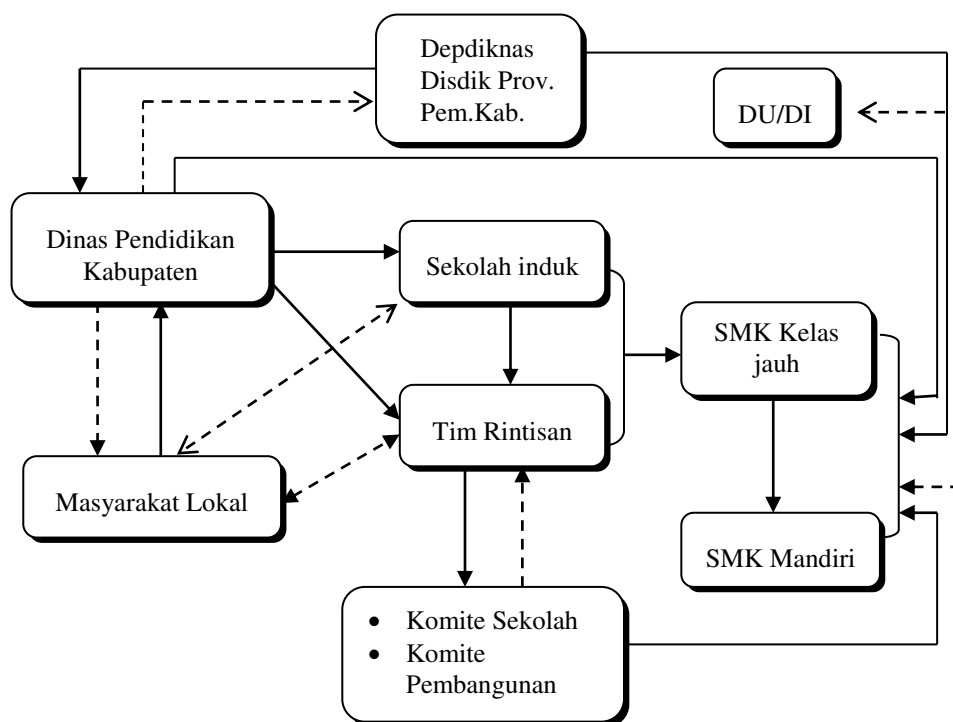
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten Cianjur telah diimplementasikan dengan memberdayakan banyak unsur, mulai dari tokoh masyarakat, aparat desa, muspika, pejabat dan staf Dinas Pendidikan, BAPPEDA, DPRD, Dinas-dinas terkait, Dunia Usaha/Industri dan lain-lain, mulai dari langkah penjajagan, perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai dengan sebuah SMK berjalan. Karena pada awalnya kebijakan ini benar-benar merupakan respons terhadap kebijakan pusat, maka pada tahun-tahun pertama diimplementasikannya kebijakan tersebut, tidak ada perencanaan spesifik yang menyebutkan pengembangan SMK Kecil pada perencanaan

tingkat Kabupaten maupun Dinas Pendidikan, kecuali rencana pembangunan satu USB SMK dengan anggaran 1,5 Milyar Rupiah. Dilihat dari sisi manfaat, implementasi kebijakan tersebut telah mampu memberikan manfaat bagi daerah tersebut yaitu berupa adanya peningkatan mutu sumber daya manusia, baik intelektualitasnya, keterampilannya maupun mentalnya (Tilaar dan Nugroho, 2008; Supriadi, 2002), serta ekonomi dan sosial, (Cohn, 1978; Becker, 1993; dan Diamond, 2010) maupun budaya (Tilaar dan Nugroho, 2008), yang nota bene memiliki visi menuju Cianjur yang lebih sejahtera dan lebih berakhlakul karimah. Namun demikian, jika merujuk kepada temuan hasil penelitian Mahdiansyah, dalam penelitiannya yang berjudul **“Kajian Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Indonesia”**, bahwa pemenuhan terhadap mutu pendidikan masih menjadi permasalahan. (Sumber: *Sistem Informasi Penelitian Pendidikan - Puslitjak Balitbang Kemdikbud*. Diunduh: 11-01-2013), maka perlu ada langkah-langkah yang lebih intensif dalam memberdayakan unsur-unsur tersebut, sedemikian rupa sehingga SMK yang dikembangkan lebih mampu menjangkau masyarakat dari semua kalangan dan berasal dari semua lokasi, agar mereka yang berpotensi putus sekolah akan dapat tertampung dan tertangani dengan baik.

Terdapat perbedaan implementasi kebijakan antara kebijakan yang sesungguhnya dikeluarkan

oleh Departemen Pendidikan Nasional waktu itu dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Cianjur. Departemen Pendidikan Nasional merilis Program SMK Kecil di SMP/Pesantren dan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, sedangkan yang diterapkan di Kabupaten Cianjur adalah SMK Kecil mandiri dan USB SMK. Penyesuaian kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan terjadi setelah SMK tersebut beroperasi, misalnya konflik antara dua pimpinan lembaga yang berada pada satu lokasi. Resiko dari adanya penyesuaian ini adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak, khususnya untuk penyediaan lahan baru. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur telah memasukan pengembangan SMK sebagai bagian dari rintisan wajib belajar 12 tahun. Temuan tersebut mengindikasikan begitu besarnya antusiasme masyarakat dalam membantu implementasikan kebijakan, untuk itu, agar di masa yang akan datang peran masyarakat tersebut dapat lebih maksimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyono (2002), maka pemerintah daerah perlu mengakomodir dan memberikan apresiasi kepada mereka yang memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan pendidikan, misalnya berupa penghargaan.

Gambar di bawah ini menunjukkan alur implementasi kebijakan SMK di Cianjur.



Gambar 1.
Alur Pengorganisasian dan Pelaksanaan Pendirian SMK Baru
di Kabupaten Cianjur

Yang perlu dikritisi dari penyesuaian kebijakan tersebut adalah bahwa:

1. Seharusnya penyesuaian kebijakan SMK Kecil di SMP/Pesantren menjadi SMK Kecil mandiri disertai pula dengan perencanaan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana pembelajaran yang matang.
2. Lokasi tempat dibangunnya SMK tersebut sedapat mungkin berada pada jalur yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang banyak, serta dekat dengan SLTP SLTP sebagai sumber calon siswa baru, sehingga lebih dapat memenuhi tuntutan *pemerataan* dan *kesamaan hak* atas pendidikan (Abustam, 2012; Wilie, 2011, Suparlan, 2005; *Education equity policies, 2011*).

Implementasi kebijakan tersebut telah mampu memberikan nilai tambah berupa meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SLTA di Kabupaten Cianjur, dari semula pada tahun 2002 hanya kurang dari 20 menjadi 48,59 pada tahun 2011. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sekolah, kehadiran SMK SMK tersebut telah memberikan nilai tambah berupa lebih mudah terserapnya lulusan pada lapangan kerja. Dengan kata lain, implementasi kebijakan tersebut telah memberikan manfaat baik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (Tilaar dan Nugroho, 2008), kesiapan memasuki dunia kerja (Supriadi, 2002) dan peningkatan ekonomi dan sosial, (Cohn, 1978; Becker, 1993; dan Diamond, 2010). Dengan kata lain implementasi kebijakan ini telah menghasilkan *policy performance* (Dunn, 2003) yang cukup baik. Namun demikian keberhasilan tersebut masih belum maksimal dan dilihat dari sisi mutu, mutu layanan pendidikan pada SMK SMK tersebut masih perlu secara terus menerus ditingkatkan, karena faktanya ketersediaan sarana, dana dan tenaga yang dimiliki oleh setiap SMK masih sangat terbatas. Jika merujuk pada temuan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdiansyah, dalam penelitiannya yang berjudul **“Kajian Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Indonesia”**, pemerintah tidak bisa berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya tanggung-jawab pemenuhan mutu pendidikan tersebut kepada para pengelola sekolah. Pemerintah disarankan untuk senantiasa memenuhi kewajiban hukum atas hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. (Sumber: *Sistem Informasi Penelitian Pendidikan - Puslitjak Balitbang Kemdikbud. Diunduh: 11-01-2013*). Dengan kata lain, perlu ada langkah-langkah yang lebih implementatif dan lebih

mampu menjaring masyarakat dari semua kalangan dan berasal dari semua lokasi, sedemikian rupa mereka yang berpotensi putus sekolah akan dapat tertampung dan tertangani dengan baik diantaranya dengan mengembangkan *“model SMK berbasis ekonomi masyarakat pedesaan”*.

Pengendalian terhadap implementasi kebijakan dilakukan dari hulu sampai hilir, baik yang berupa penyediaan prosedur kerja, bimbingan maupun pengawasan. Pengendalian dimaksud pada dasarnya terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu permasalahan yang berasal dari dalam lingkungan Dinas Pendidikan itu sendiri dan permasalahan yang berasal dari luar. Permasalahan yang berasal dari lingkungan dinas pada umumnya lebih berupa keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki, seperti keterbatasan ketersediaan dana, keterbatasan tenaga, tidak tersedianya lahan untuk pembangunan gedung sekolah dan lain-lain, serta kurang fahamnya individu pejabat tertentu terhadap kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan. Permasalahan terbatasnya sumber-sumber yang dimiliki diatasi dengan pemberdayaan berbagai kekuatan. Upaya tersebut telah sejalan dengan amanat perundang-undangan diantaranya PP No. 48 tahun 2008. Sementara itu, permasalahan kurang-fahaman individu tertentu terhadap kebijakan diatasi dengan pendekatan personal serta sosialisasi. Permasalahan yang berasal dari luar pada dasarnya adalah adanya gangguan dari individu atau kelompok tertentu yang merasa memiliki kepentingan terhadap terimplementasikannya kebijakan tersebut. Dalam perjalanannya permasalahan-permasalahan tersebut tidak sampai menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan, karena telah dapat diatasi melalui upaya pendekatan, baik secara personal maupun melalui jalur kedinasan. Sementara itu, kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat yang ada, seperti BAWASDA, Inspektorat, BPK, BPKP, bahkan LSM.

Namun demikian, merujuk pada pendapat Hahn (2012), untuk lebih meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan, penulis ajukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya *sosialisasi* yang lebih baik yang dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

2. Perlu dibangun *koordinasi* dan *konsolidasi* yang lebih baik diantara para pelaksana kebijakan.
3. Perlu dibangun *keterbukaan* oleh para pucuk pimpinan yang terkait dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga akan tumbuh sikap saling percaya.
4. Perlu *keaktifitas* dari para pelaksana kebijakan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.

Pada umumnya, didirikannya SMK SMK baru di Kabupaten Cianjur diawali oleh adanya inisiatif dari masyarakat yang didukung oleh respons yang baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. SMK SMK baru tersebut dapat dibangun dan dapat menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat karena adanya dukungan yang baik dari berbagai pihak, seperti komite sekolah, masyarakat umum, DU/DI dan pihak Pemerintah. Hal tersebut sangat sejalan peran sekolah sebagai sebuah organisasi sosial yang terbuka (Hoy dan Miskel, 2008), juga dengan amanat PP No. 48 tahun 2008, khususnya dalam hal pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pendidikan nasional yang bermutu. Namun demikian, inisiatif dan dukungan tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan dibuatnya payung hukum sesuai dengan kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ketersediaan sarana dan fasilitas pembelajaran serta tenaga pendidik dan kependidikan pada SMK SMK baru pada umumnya masih sangat kurang. Namun demikian, para pengelola SMK baru tersebut telah senantiasa berupaya untuk menyelenggarakan layanan pendidikan kepada para siswanya sebaik yang mereka bisa, melalui praktik manajemen/administrasi pendidikan yang baik (Engkoswara dan Komariah, 2009; Hoy dan Miskel, 2008). Upaya-upaya yang dilakukannya diantaranya dengan menjalankan pengelolaan sekolah yang sebaik-baiknya seperti meningkatkan efisiensi pemanfaatan sarana dan biaya, mengupayakan ketersediaan sarana dan tenaga secara berkelanjutan, melakukan upaya kerja-sama dengan DU/DI atau dinas/instansi terkait, meningkatkan kompetensi tenaga yang ada melalui pelatihan, IHT, pembinaan, dan MGMP. Hasilnya adalah bahwa SMK-SMK baru tersebut telah mampu meluluskan siswa-siswanya dalam ujian nasional dengan persentase kelulusan setiap tahunnya yang mencapai rata-rata lebih dari 95% dan telah mampu memasarkan lulusannya pada dunia kerja dengan tingkat keterserapan yang menggembirakan, buktinya adalah beberapa sekolah yang dijadikan sampel, telah mampu

menghasilkan rata-rata keterserapan lulusan pada dunia kerja dengan persentase sebesar lebih dari 70%. Selain itu, sukses pembangunan SMK SMK baru tersebut telah ditunjukkan oleh salah satu SMK yang pada beberapa tahun terakhir telah ditetapkan sebagai SMK RSBI.

Peran masyarakat, khususnya komite sekolah dalam mewujudkan terselenggaranya pendidikan bermutu pada SMK SMK baru sangat signifikan. Peran tersebut pada umumnya ditunjukkan melalui upaya-upaya yang dilakukannya sejak saat perencanaan didirikannya SMK sampai dengan SMK tersebut berjalan, misalnya menggalang kekuatan masyarakat, mencari lahan, menyelenggarakan pembangunan, menggalang dana dari orang tua dan masyarakat lainnya, membantu kelancaran layanan pendidikan dan lain-lain.

Agar implementasi kebijakan di masa mendatang dapat memberikan manfaat yang lebih besar, maka peran masyarakat tersebut perlu terus ditingkatkan melalui kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, misalnya dengan dibuatnya peraturan daerah serta pemberian insentif. Selain itu untuk menghindari terjadinya peningkatan angka pengangguran dari kalangan masyarakat berpendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Suryadi dan Budimansyah (2009), latihan praktik kewirausahaan adalah penting. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa perlu ada upaya perbaikan terhadap implementasi kebijakan pengembangan SMK kedepan. Adapun beberapa hal yang penulis usulkan adalah:

1. Program keahlian yang dikembangkan oleh masing masing SMK harus benar-benar disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tempat SMK tersebut berada.
2. Program-program keahlian yang dikembangkan dalam satu sekolah harus bersifat saling mendukung dan porsi kegiatan praktik kejuruannya harus lebih berorientasi kepada latihan kewira-usahaan dan kecakapan hidup.
3. Untuk lebih meningkatkan kesiapan mental para siswa, khususnya dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, masing-masing sekolah harus memfasilitasi para siswa untuk memperoleh pengalaman dari para pelaku usaha dengan porsi waktu yang lebih memadai.

Harapan yang terungkap dari berbagai sumber tentang pengembangan SMK kedepan adalah, bahwa selayaknya SMK SMK yang didirikan disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk, program-programnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah tempat SMK tersebut didirikan, serta disesuaikan dengan visi, misi serta tujuan

pembangunan daerah. Selain itu, mengingat telah terjadi pergeseran pengembangan SMK dari tujuan semula, yaitu telah dibukanya program-program keahlian baru di beberapa SMK di pedesaan yang kurang sesuai dengan kebutuhan wilayah yang bersangkutan, maka kedepan perlu ada pengetatan dalam pemberian ijin pembukaan program keahlian baru.

Terakhir, telah disebutkan bahwa walaupun implementasi kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten Cianjur telah mampu meningkatkan APK SLTA, namun peningkatan tersebut belum memuaskan, karena angka pencapaiannya baru 48.59, artinya masih sangat banyak anak usia SLTA - khususnya dari

kalangan kurang mampu dan atau yang berada di pedesaan - yang belum dapat menikmati pendidikan pada jenjang tersebut. Untuk itu, di masa yang akan datang, perlu upaya perbaikan terhadap pola implementasi kebijakan tersebut dan perlu diterapkan model baru yang lebih implementatif, mampu menyerap lulusan SLTP dari kalangan ekonomi sangat lemah dan atau yang berada pada lokasi yang terpencil, mampu menggali dan mengembangkan potensi wilayah, menggunakan tenaga serta sarana yang ada di sekitarnya, lebih menekankan pada pelatihan kewira-usahaan dan kecakapan hidup, dan dilaksanakan dengan kurikulum serta pola pembelajaran yang lebih fleksibel.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sesuai dengan paparan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun hasil yang dicapai belum maksimal, namun implementasi kebijakan pengembangan SMK di Kabupaten Cianjur telah dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Keberhasilan tersebut dapat terjadi diantaranya karena:

1. Adanya pemahaman yang baik dari para pelaksana kebijakan.
2. Kebijakan diimplementasikan dengan memberdayakan berbagai unsur kekuatan, diterapkan dengan dipilihnya program spesifik berupa SMK Kecil mandiri serta SMK dijadikan sebagai bagian dari rintisan wajib belajar 12 tahun. Strategi implementasi tersebut dinilai cukup efektif karena telah mampu meningkatkan APK SLTA.
3. Pada tingkat sekolah, implementasi kebijakan telah dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem manajemen/administrasi sekolah yang baik serta didukung oleh masyarakat.
4. Kebijakan dikendalikan melalui penyediaan prosedur kerja dan pengawasan, baik secara internal maupun melalui pengawasan yang dilakukan oleh pihak tertentu.
5. Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan SMK dinilai sangat signifikan, mulai dari tahap perintisan sampai dengan SMK tersebut berjalan.
6. Harapan dari para pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan kedepan adalah bahwa sebaiknya kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing serta diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:

Pertama, agar implementasi kebijakan pada masa yang akan datang dapat menghasilkan hasil kebijakan yang lebih optimal, maka kebijakan tersebut perlu direncanakan dengan lebih matang dan lebih terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan lainnya - misalnya kebijakan anggaran, kebijakan ketenagaan dan lain-lain, serta kebijakan-kebijakan dari dinas/instansi yang lain. Hal ini penulis usulkan sehubungan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, kebijakan tersebut dilaksanakan lebih berupa respons terhadap kebijakan pusat dan dorongan masyarakat. Selain itu, penulis menemukan bahwa kebijakan tersebut tidak disertai dengan perencanaan penyediaan dana dan tenaga yang memadai. Akibatnya, SMK SMK yang baru didirikan penyelenggaraannya menjadi kurang optimal.

Kedua, sinergi antara SMK dengan dinas/instansi terkait belum tertuang secara jelas dalam program masing-masing SMK. Untuk itu, perlu ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memfasilitasi serta memberikan payung hukum terhadap jalinan kerja-sama antara SMK SMK baru dengan dinas/instansi terkait.

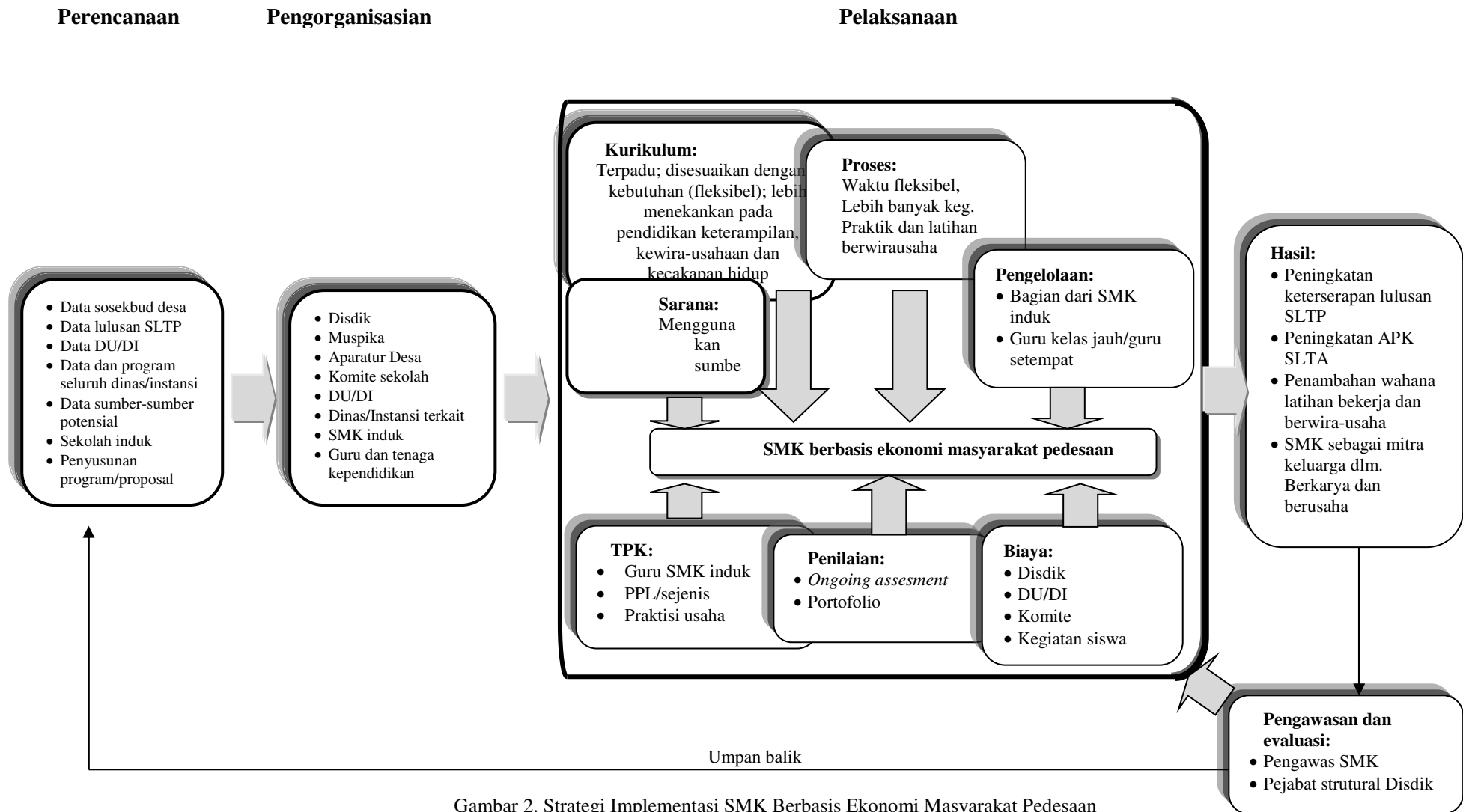
Ketiga, persentase lulusan SMK yang melakukan kegiatan usaha mandiri pada sekolah-sekolah terobservasi cenderung masih sangat kecil, padahal berdasarkan data yang penulis peroleh, salah satu tujuan awal dari diperbanyaknya jumlah SMK di Kabupaten Cianjur, adalah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi setiap wilayah dengan disediakan tenaga-tenaga terampil lulusan SMK SMK tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya Dinas Pendidikan untuk mendorong agar setiap SMK baru lebih menekankan kegiatan pembelajarannya pada kegiatan kewira-usahaan dan pelatihan kecakapan hidup.

Keempat, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada SMK SMK yang dikembangkan di berbagai wilayah pengembangan, telah terjadi pergeseran pengembangan dari tujuan pengembangan semula, yaitu bahwa SMK SMK baru cenderung membuka program program keahlian yang didasarkan atas *trend* yang disukai anak-anak lulusan SLTP tanpa melakukan analisis terhadap daya dukung lingkungan serta prospek pemasaran lulusannya, misalnya otomotif, administrasi perkantoran dan teknik komputer dan jaringan, padahal dilihat dari sisi jumlah siswa dan jumlah lulusan program program tersebut merupakan program yang telah jenuh. Akibatnya lulusan yang dihasilkan menjadi kurang bermanfaat bagi pembangunan wilayah tersebut. Untuk itu, perlu ada reevaluasi dari Dinas Pendidikan terhadap program program yang dikembangkan oleh setiap

SMK dan perlu memperketat pemberian ijin pembukaan program keahlian baru.

Kelima, sebagaimana hasil analisis yang telah penulis lakukan, untuk lebih meningkatkan aksesibilitas SMK dan meningkatkan nilai kemanfaatan SMK yang dikembangkan, perlu dipertimbangkan untuk mengimplementasikan model SMK berbasis ekonomi masyarakat pedesaan dengan strategi implementasi sebagaimana disajikan pada Gambar di halaman berikut.

Keenam, penulis menyadari bahwa kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ini sangat terbatas, oleh karena itu, kemungkinan temuan-temuannya belum menggambarkan dengan tepat apa apa yang seharusnya tergambarkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan topik kajian yang serupa.



Gambar 2. Strategi Implementasi SMK Berbasis Ekonomi Masyarakat Pedesaan

- Abustam, H.M. Idrus. (2012). *Pemerataan dan Keadilan Dalam Pendidikan*. Fajar Online. (Online). Tersedia: <http://www.fajar.co.id> . (27 September 2012).
- Anonim. (2010). *Educational Equity Policy*. Project: Asian American Public Policy by Students at the University of Maryland. (Online). Tersedia: <http://www.umd.edu>. (1 November 2012).
- Anonim. (2010). *Quality Management Systems*. Departement of Trade and Industry – UK. (Online). Tersedia: <http://www.iso.org>. (5 Januari 2011).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2002). *Kabupaten Cianjur dalam Angka*. BPS-Cianjur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2009). *Kabupaten Cianjur dalam Angka*. BPS-Cianjur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2010). *Kabupaten Cianjur dalam Angka*. BPS-Cianjur.
- Banghart, F.W. and Albert Trull. (1997). *Educational Planning*. The MacMillan Company. New York.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Becker, K. H. (2004). *A Comparison of Students' Achievement and Attitudes between Constructivist and Traditional Classroom Environment in Thailand Vocational Electronics*. Journal of Vocational Education Research. Volume 29, Issue 2. (Online). Tersedia: acter.metapress.com. (10 Juni 2011).
- Berg, B. L. (2007). *Qualitative Research For The Social Sciences*. Pearson. New York. USA.
- Cohn, E. (1978). *The Economic of Education*. Ballinger Publishing Company. USA.
- Dey, I. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Routledge. London and New York.
- Diamond, I. (2008). *Education, Globalization and The Knowledge Economy*. The Economic and Social Research Council. UK. (Online). Tersedia: <http://www.esrc.ac.uk>. (30 Juni 2010).
- Direktorat Dikmenjur. (2003). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Imbal Swadaya SMK Kecil*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. (2005). *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Djatmiko, I. W. (2011). *Inkonsistensi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. (Online). Tersedia: <http://staff.uny.ac.id>. (5 Mei 2012).
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis*. Prentice Hall. New Jersey. USA.
- Edwards, M. C. (2004). *Cognitive Learning, Student Achievement, and Instructional Approach in Secondary Agriculture Education: A Review of Literature with Implication for Future Research*. Journal of Vocational Education Research. Volume, 29, Issue 1. (Online). Tersedia: acter.metapress.com. (10 Juni 2010).
- EFA Global Monitoring Report. (2005). *Understanding Quality Education*. (Online). Tersedia: <http://www.unesco.org>. (20 Agustus 2012)
- Engkoswara dan Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Fakhri, Z. (2010). *Pendidikan Kejuruan di Indonesia*. AcehFoRum. (Online). Tersedia: <http://www.acehforum.or.id>. (12 April 2010).
- Family Involvement Partnership for Learning. (2012). *How Communities Can Support Family Involvement in Education*. Washington DC – USA. (Online). Tersedia: <http://www.kidsource.com>. (1 Desember 2012).
- Fattah, N. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Fischer, F., G.J. Miller and M.S. Sidney. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis*. CRC Press. New York.
- Fowler, F.C. (2009). *Policy Studies for Educational Leaders an Introduction* (third

- edition). Pearson Education. Newyork – USA.
- Goodman, D. (2012). *What Are the Steps in the Public Policy Process?* wiseGEEK. (Online). Tersedia: <http://www.wisegeek.com>. (1 Desember 2012).
- Grey, B. (2012). *Using Human Rights Standards to Assess Privatisation of Education in Africa*. Right to Education Project. (Online). Tersedia: <http://www.oxfamblogs.org>. (1 Desember 2012).
- Hahn, A. J. (2012). *Oriented Public Policy Education*. Department of Human Service Studies New York College of Human Ecology - Cornell University, Ithaca, New York. (Online). Tersedia: <http://www.eric.ed.gov>. (29 November 2012).
- Haki Zetu. (2012). *The Right to Education*. Right to Education Project. (Online). Tersedia: www.amnesty.nl/spa. (10 Januari 2013).
- Hasan, B. *Pendidikan Kejuruan di Indonesia*. (Online). Tersedia: <http://file.upi.edu>. (10 Januari 2013).
- Henderson, J. G and K. R, Kesson. (2004). *Curriculum Wisdom: Educational Decisions in Democratic Societies*. PEARSON Merrill Prentice Hall. Ohio.
- Hoxby, C. M. (2002). *School Choice and School Productivity*. Standford University: National Bureau of Economic Research (NBR). NBR Working Paper No. W8873. (Online). Tersedia: <http://www.nber.org>. (20 Juni 2010).
- Hoy, W. K. and Cecil G. Miskel. (2008). *Educational Administration*. McGraw Hill. Singapore.
- Ismaun. (2007). *Kapita Selektta Filsafat Administrasi Pendidikan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- James, I. (2010). *A Framework for Developing Vocational Moral*. Journal of Vocational Education and Training. Volume 62, Number 4. (Online). Tersedia: <http://www.tanfonline.com>. (29 Juni 2011).
- Johnson, S.D., et al. (2004). *Internet-Based Learning in Postsecondary Career and Technical Education*. Journal of Vocational Education Research. Volume 29, Issue 2. (Online). Tersedia: actr.metapress.com (10 Juni 2010).
- Karam, G. (2006). *Vocational and technical education in Lebanon: Strategic issues and challenges*. International Education Journal, 2006, 7(3), 259-272. (Online). Tersedia: <http://iej.com.au>. (6 Januari 2013).
- Komariah, A. dan Cepi Triatna. 2005. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Bumi Aksara. Bandung.
- Kristianty, T. (2005). *Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu Cara Deming*. Jurnal Pendidikan Penabur. No. 04/Th. IV/Julii 2005. (Online). Tersedia: <http://file.upi.edu>. (10 Juni 2010).
- Lahur, A. and Nurtjahja, O. (2002). *'Twinning fever' in national education system of Indonesia: Problems, approaches and impacts*. HERSDA. (Online). Tersedia: <http://www.hersda.org.au>.
- Leigh, A. and C, Ryan. (2010). *"How Has School Productivity Changed in Australia?"*. JEL. (H52,121,122). 1-47. (Online). Tersedia: <http://www.parliament.wa.gov.au>. (14 Desember 2010).
- Levy. (2007). *An Introduction to Policy Analysis*. Public Policy Class Material. (Online). Tersedia: <http://pdf-world.net>. (15 Mei 2013).
- Lewins, A., et al. (2010). *What is Qualitative Data Analysis (QDA)?*. (Online). Tersedia: <http://onlineqda.hud.ac.uk>. (15 Mei 2013).
- Little, A. W. (2012). *EDUCATION FOR ALL: Policy and Planning Lessons from Sri Lanka*. DFID. (Online). Tersedia: <http://www.ioe.ac.uk>. (5 Oktober 2012).
- Mack, N., et al. (2005). *Qualitative Research Methods: A DATA COLLECTOR'S FIELD GUIDE*. Family Health International – USAID. (Online). Tersedia: <http://www.fhi.org>. (5 Januari 2012).
- Mahdiansyah. *Kajian Hubungan Dunia Pendidikan dengan Dunia Kerja*. SIPP – Pusitjak - Balitbang Kemendiknas. (Online). Tersedia: <http://sippendidikan.org>. (11 Januari 2013).

- Mahdiansyah. *Kajian Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Indonesia*. SIPP – Pusitjak - Balitbang Kemendiknas. (Online). Tersedia: <http://sippendidikan.org>. (11 Januari 2013).
- Massey, V. (2011). *Developing a Quality Management System*. London Laboratory Service Group. (Online). Tersedia: <http://www.google.co.id> (5 Januari 2011).
- McGraw, B. (2004). “*Quality Education: Is the sky the limit?*”. OECD Observer. No. 242, March 2004. (Online). Tersedia: <http://www.oecd.org>. (5 Januari 2011).
- Mc. Millan, J. H. and Sally Schumacher. (1997). *Research in Education a Conceptual Introduction*. Longman. New York and London.
- Meirawan, D. (2010). *Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan*. IPB Press. Bogor.
- Millah, S. (2009). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin*. UPI. Bandung.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. (2007). *Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Cianjur*. PT. Gelar Buana Persada. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (SNP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rothstein, J.M. (2003). “*Good Principal or Good Peers? Parental valuation of School Characteristics, Tiebout Equilibrium, and the Incentive Effects of Competition among Jurisdiction*”. Princeton University Education Research Section. (October, 2003) (1-54). (Online). Tersedia: <http://www.tandfonline.com>. (10 Juni 2010).
- Redmann, D. H. And Joe W. Kotrlik. (2004). *Analysis of Technology Integration in the Teaching-Learning Process in Selected Career and Technical Education Programs*. Journal of Vocational Education Research. (Online). Tersedia: acter.metapress.com. (10 Juni 2010).
- Roller, M.R. (2011). *Qualitative Research Design: Selected Articles from Research Design Review*. (Online). Tersedia: www.rollerresearch.com. (5 Januari 2012).
- Ruhland, S.K. (2004). *Perceptions of Traditionally and Alternatively Certified Career and Technical*. Journal of Vocational Education Research. Volume 28, Issue 3. (Online). Tersedia: acter.metapress.com (10 Juni 2010).
- Sallis, E. (2002). *Total Quality Management in Education*. Kogan Page. London – UK.
- Salusu, J. (2008). *Pengambilan Keputusan Strategik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Satori, D dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Siswantari. *Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan*. SIPP – Pusitjak - Balitbang Kemendiknas. (Online). Tersedia: <http://sippendidikan.org>. (11 Januari 2013).
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Supriadi, D. (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia*. Direktorat Dikmenjur – Depdiknas. Jakarta.
- Suryadi, A. Dan Dasim Budimansyah. (2009). *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik*. Aksara Press. Bandung.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suparlan. (2005). *Antara Mutu dan Pemerataan Pendidikan*. PPPG Matematika. Jogjakarta.

- Susilo, M.E. (2012). *Pentingnya Pemerataan Pendidikan*. (Online). Tersedia: edukasi.kompasiana.com. (14 Oktober 2012).
- Suyono, H. (2002). *Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Online). Tersedia: www.damandiri.or.id. (14 Oktober 2012).
- Syahza, A. (2011). *Model Pengembangan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Tahun) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Riau. (Online). Tersedia: mizaneducation.blogspot.com. (12 Desember 2011).
- Thomas, D.R. (2003). *A General Inductive Approach for Qualitative Data Analysis*. School of Population Health University of Auckland - New Zealand. (online). Tersedia: <http://www.frankumstein.com>. (15 Mei 2013).
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tilak, J. (2002). *Vocational Education and Training in Asia*. National Institute of Educational Planning and Administration. New Delhi-India. (Online). Tersedia: <http://www.norrag.org>. (5 Mei 2011).
- Undang-undang Dasar tahun 1945. (2003). BP. Dharma Bhakti. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BP. Dharma Bhakti. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.
- UNICEF. (2000). *Defining Quality in Education*. United Nation Plaza, H-7. New York. (Online). Tersedia: <http://www.unicef.org>. (10 Juni 2011).
- Wirda, Y. *Analisis kebijakan pendidikan: Pemerataan dan perluasan akses pendidikan*. SIPP – Puslitjak - Balitbang Kemendiknas. (Online). Tersedia: <http://sippendidikan.org>. (11 Januari 2013).
- Zinser, R. (2004). *New Role to Meet Industry Needs: A Look at the Advanced Technological*. Journal of Vocational Education Research. Volume 29,